

## Partisipasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Mendukung Program Kerja Pemerintahan Desa Lempe Kecamatan Dampal Selatan

Rima Melati <sup>1\*</sup>, Muhammad Arief<sup>2</sup>, Indah Ahdiah<sup>3</sup>,

<sup>1</sup>Universitas Tadulako, Palu, Indonesia, rimamelati1603@gmail.com

<sup>2</sup>Universitas Tadulako, Palu, Indonesia, ariefuntad@gmail.com

<sup>3</sup>Universitas Tadulako, Palu, Indonesia, indahahdiah@untad.ac.id

\*Correspondence : rimamelati1603@gmail.com

### ARTICLE INFO:

Kata kunci: Kecamatan Dampal Selatan, Partisipasi masyarakat, Pemberdayaan keluarga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Program kerja pemerintah desa

Received. : Februari 2026

Revised. : Februari 2026

Accepted : Maret 2026

### ABSTRAK:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi PKK dalam mendukung program kerja Pemerintah Desa Lempe, Kecamatan Dampal Selatan, mengingat kontribusi strategis PKK dalam pengembangan desa dan pemberdayaan masyarakat. PKK memiliki peran sentral dalam mendukung kegiatan desa dan meningkatkan kapasitas masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif* dengan desain *deskriptif*, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dokumentasi kegiatan, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif berdasarkan teori partisipasi Cohen dan Uphoff (1977) yang mencakup pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengambilan manfaat, dan evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKK Desa Lempe berpartisipasi aktif pada seluruh tahapan tersebut, mulai dari pengambilan keputusan melalui pengumpulan aspirasi dasawisma dan penyusunan usulan *POKJA*, pelaksanaan kegiatan seperti penyuluhan kesehatan, pelatihan keterampilan, gotong royong, sosialisasi rumah sehat, hingga pendampingan program pemerintah desa, pengambilan manfaat berupa peningkatan pengetahuan, keterampilan, kepercayaan diri, dan kemandirian ekonomi keluarga, serta evaluasi rutin bersama pemerintah desa untuk menilai keberhasilan program dan merumuskan langkah perbaikan. Temuan ini menunjukkan bahwa keterlibatan PKK tidak hanya meningkatkan efektivitas program desa, tetapi juga memperkuat kapasitas dan hubungan sosial masyarakat, sehingga PKK Desa Lempe terbukti menjadi mitra strategis pemerintah desa dalam perencanaan hingga evaluasi program pengembangan desa, memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas program dan pemberdayaan masyarakat, serta menjadi acuan bagi desa lain dalam mendorong partisipasi organisasi masyarakat untuk pengembangan lokal yang berkelanjutan.

### ABSTRACT:

This study aims to analyze the participation of PKK in supporting the work programs of Lempe Village Government, Dampal Selatan Subdistrict, considering the strategic contribution of PKK in village development and community empowerment. PKK plays a central role in supporting village activities and enhancing community capacity. This study uses a qualitative

*approach with a descriptive design, collecting data through observation, in-depth interviews, activity documentation, and literature review, which are then analyzed descriptively based on Cohen and Uphoff's (1977) participation theory covering decision-making, implementation, benefit-taking, and evaluation. The results indicate that PKK of Lempe Village actively participates in all these stages, from decision-making through collecting aspirations from dasawisma and preparing POKJA proposals, to implementing activities such as health counseling, skills training, communal work (gotong royong), healthy home socialization, and assisting village government programs, benefiting from increased knowledge, skills, self-confidence, and family economic independence, and conducting routine evaluations with the village government to assess program success and formulate improvement steps. These findings show that PKK involvement not only increases the effectiveness of village programs but also strengthens community capacity and social relationships, making PKK of Lempe Village a strategic partner of the village government in planning to program evaluation, significantly contributing to the quality improvement of programs and community empowerment, and serving as a reference for other villages in promoting community organization participation for sustainable local development.*

## **Pendahuluan**

Pemerintahan desa merupakan unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat dan memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik, serta penguatan demokrasi lokal (Sutiyo and Maharjan, 2017). Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memperoleh kewenangan lebih luas dalam mengelola pembangunan serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembentukan kebijakan publik di tingkat lokal (Rahmawan, 2023). Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan partisipasi dalam pembangunan desa (Irwan and Rusdi, 2019). Partisipasi masyarakat dalam penyusunan *Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes)* merupakan elemen penting dalam merancang program kerja desa yang efektif dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat (Rahmah *et al.*, 2024). Partisipasi masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan pembangunan desa, dengan semakin tinggi keterlibatan warga, semakin besar peluang keberhasilan pembangunan (Munawaroh and Khotimah, 2025).

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) memiliki peran strategis sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa dalam proses perencanaan pembangunan desa, terutama dalam musyawarah perencanaan dan penyusunan dokumen *RKPDDes* dan *RPJMDes* (Khadikah and Muljanto, 2025). Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan organisasi kemasyarakatan yang berperan strategis dalam mendukung program pembangunan desa, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan keluarga sebagai unit terkecil masyarakat (Malthuf and Hapiatun, 2024). Program PKK di Desa Kotaraja menunjukkan bahwa pelaksanaan

program PKK memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pendekatan holistik yang mencakup aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sosial (Santia, Herlina and Sa'di, 2025).

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang *Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga* memperkuat peran PKK sebagai gerakan nasional yang menjadi instrumen strategis dalam pembangunan masyarakat, terutama melalui 10 program pokok yang menjadikan keluarga sebagai basis pembangunan (Mita, Selfiana and Arsalim, 2025). Permendagri Nomor 36 Tahun 2020 memperkuat posisi Tim Penggerak PKK (TP PKK) sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan desa, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, penggerak, dan pengendali program pemberdayaan keluarga di tingkat desa (Mendagri, 2020).

Secara teoritis, partisipasi masyarakat dapat dianalisis menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Cohen & Uphoff (1977), yang meliputi partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi. Dalam penelitian pembangunan desa, konsep ini digunakan untuk menilai sejauh mana masyarakat dan lembaga lokal terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, manfaat, dan evaluasi pembangunan desa dengan indikator partisipasi yang komprehensif (Nurkhalisa, 2024).

Desa Lempe, Kecamatan Dampal Selatan, memiliki struktur organisasi PKK yang telah terbentuk hingga tingkat dasawisma. Berdasarkan observasi awal, partisipasi anggota PKK dalam berbagai kegiatan masih belum merata dan cenderung didominasi pengurus inti. Pelaksanaan sepuluh program pokok PKK juga menunjukkan ketidakseimbangan antara program rutin dan program pemberdayaan ekonomi serta keterampilan. Partisipasi anggota PKK yang rendah, baik dalam perencanaan maupun evaluasi program, berkaitan dengan keterbatasan waktu, rendahnya motivasi internal, dan kurangnya keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga dukungan PKK terhadap program pemerintah desa, terutama dalam pemberdayaan keluarga dan pengembangan kapasitas masyarakat, belum maksimal.

Peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan desa seperti PKK masih belum optimal, terutama dalam partisipasi masyarakat dan keterlibatan mereka dalam perencanaan serta pelaksanaan program desa (Limpele, Setiabudhi and Sendow, 2025). Partisipasi anggota masyarakat, termasuk kader PKK, dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program PKK masih terbatas. Partisipasi sering terlihat hanya pada pelaksanaan kegiatan, sedangkan keterlibatan dalam perencanaan dan evaluasi masih rendah (Hakim and Mone, 2021). Efektivitas Program PKK di beberapa desa belum optimal karena dukungan pemerintah desa, sumber daya, dan partisipasi masyarakat yang terbatas, sehingga peran PKK dalam mendukung program kerja pemerintah desa belum maksimal (Cahya, 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis partisipasi anggota PKK dalam mendukung program kerja Pemerintah Desa Lempe, Kecamatan Dampal Selatan, dengan fokus pada keterlibatan PKK dalam perencanaan,

pelaksanaan, dan evaluasi program pemberdayaan keluarga. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pemerintahan dan politik, serta menjadi evaluasi bagi pemerintah desa dalam meningkatkan efektivitas partisipasi masyarakat pada program-program desa berikutnya.

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam mendukung program kerja Pemerintah Desa Lempe, Kecamatan Dampal Selatan. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami fenomena sosial secara kontekstual berdasarkan pengalaman, pandangan, dan persepsi para aktor yang terlibat. Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Lempe karena wilayah ini merupakan pusat pelaksanaan program PKK yang aktif dan memiliki peran strategis dalam mendukung program kerja pemerintah desa. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi berupa arsip, laporan resmi, dokumen kebijakan desa, serta catatan kegiatan PKK yang berkaitan dengan program kerja desa. Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan informan untuk memperoleh informasi mengenai peran PKK, kontribusinya terhadap program pemerintah desa, serta interaksi antara PKK, pemerintah desa, dan masyarakat. Observasi dilakukan dengan mengamati kegiatan PKK, partisipasi masyarakat, dan pelaksanaan program kerja desa secara langsung. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive* berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terkait program PKK. Informan dalam penelitian ini meliputi Kepala Desa Lempe, Ketua PKK Desa Lempe, Sekretaris PKK Desa Lempe, tokoh-tokoh perempuan di desa, serta kader PKK aktif. Analisis data dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan sejak pengumpulan data hingga penelitian selesai. Tahapan analisis meliputi reduksi data, yaitu pemilahan dan penyederhanaan data sesuai fokus penelitian, penyajian data, dengan menyusun informasi secara sistematis dalam bentuk narasi, serta penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan makna dan temuan penelitian terkait peran PKK dalam mendukung program kerja Pemerintah Desa Lempe.

## Hasil

### 1. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Partisipasi dalam pengambilan keputusan merupakan bentuk keterlibatan aktif individu maupun kelompok dalam proses menentukan kebijakan, program, maupun kegiatan yang akan dilaksanakan. Hal ini terlihat melalui aktivitas Tim PKK yang secara sistematis mengumpulkan aspirasi masyarakat. Ibu Darmawati, selaku Ketua PKK Desa Lempe, menjelaskan, "*Kami mengumpulkan dulu dari dasawisma, lalu pokja PKK menyusunnya. Setelah itu kami adakan rapat tim PKK dan hasilnya dibawa ke*

*Musrembang desa untuk disetujui.*" Wawancara ini menunjukkan bahwa PKK mengumpulkan berbagai data masyarakat, termasuk informasi tentang keluarga, kesehatan, pendidikan, dan kondisi ekonomi. Selanjutnya, usulan-usulan dari dasawisma dibahas oleh semua Kelompok Kerja (*Pokja*) PKK dan disusun menjadi rencana kerja, yang kemudian dirapatkan tim PKK sebelum diajukan ke Musyawarah Perencanaan Pembangunan (*Musrembang*) desa. Program yang disepakati dalam *Musrembang* selanjutnya ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan (*RKP*) Desa dan menjadi bagian dari program kerja pemerintah desa.

Sekretaris PKK Desa Lempe, Ibu Melinda, menegaskan bahwa pengelolaan usulan ini dilakukan secara koordinatif. Ia menjelaskan, "*Kami menerima masukan anggota PKK, terus kami koordinasi dalam rapat PKK setelah dirangkum, kami bawa ke musyawarah desa supaya bisa disepakati bersama.*" Pernyataan ini sejalan dengan penjelasan Kepala Desa Lempe, Bapak Zainal Ishak, yang menyatakan, "*PKK itu aktif dari awal, dari mengumpulkan aspirasi, rapat koordinasi sampai ikut mengajukan program ke Musrembang. Jadi mereka bagian penting dari perencanaan desa.*" Wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa sekretaris PKK bertanggung jawab menerima dan merangkum masukan anggota, kemudian mengoordinasikannya dalam rapat tim PKK sebelum diusulkan ke *Musrembang* desa agar dapat disepakati bersama.

Peran PKK juga mendapat perhatian dari tokoh perempuan Desa Lempe. Ibu Mardawia Marban menjelaskan, "*Peran PKK di dasawisma penting sekali karena mereka yang kumpulkan aspirasi perempuan. Dari situ usulan dibawa ke desa dan diproses oleh pemerintah desa.*" Begitu pula Ibu Nurhayati, kader PKK, yang menyatakan bahwa mereka di lapangan mengumpulkan pendapat masyarakat yang kemudian disampaikan kepada pengurus PKK dan diajukan ke pemerintah desa. Pernyataan ini menegaskan pentingnya PKK sebagai penghubung antara masyarakat, khususnya perempuan, dengan pemerintah desa dalam proses perencanaan pembangunan.

Berdasarkan hasil wawancara, partisipasi PKK dalam pengambilan keputusan di Desa Lempe dapat dilihat melalui beberapa tahapan. PKK mengumpulkan aspirasi masyarakat melalui dasawisma, mengelola dan menyusun usulan melalui *Pokja* PKK, melakukan rapat koordinasi internal untuk menetapkan rencana kerja, mengajukan usulan dalam *Musrembang* desa, serta berperan dalam pembahasan dan penetapan program *RKP* desa. PKK terbukti aktif sejak awal pemekaran Desa Lempe dan menjadi penghubung penting antara masyarakat dan pemerintah desa. Peran ini terutama penting bagi tokoh perempuan karena PKK bertugas mengumpulkan aspirasi mereka dan memastikan usulan tersebut diajukan serta diproses secara resmi oleh pemerintah desa. Dengan demikian, PKK di Desa Lempe telah melaksanakan partisipasi pengambilan keputusan sesuai kemampuan anggota dan kebutuhan masyarakat.

## **2. Partisipasi dalam Pelaksanaan**

Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan tahap di mana masyarakat terlibat langsung dalam menjalankan program atau kegiatan yang telah disepakati. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga menunjukkan keterlibatan yang nyata dalam

melaksanakan berbagai program kerja. Ibu Darmawati, Ketua PKK Desa Lempe, menjelaskan, *“Pelaksanaan program PKK kami lakukan dengan menyusun rencana kerja yang selaras dengan 10 program pokok PKK. Kami menjadi mitra kerja yang menggerakkan masyarakat khususnya perempuan, untuk ikut dalam kegiatan pembangunan desa.”* Pernyataan ini menegaskan bahwa pelaksanaan program PKK dilakukan berdasarkan rencana kerja yang berlandaskan pada sepuluh program pokok PKK, meskipun dalam praktik hanya sembilan program yang terlaksana, seperti penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, kelestarian lingkungan hidup, serta perencanaan sehat. Selain itu, PKK berperan sebagai mitra kerja yang menggerakkan masyarakat, khususnya perempuan, agar aktif dalam kegiatan pembangunan desa.

Sekretaris PKK Desa Lempe, Ibu Melinda, menambahkan bahwa pelaksanaan kegiatan tidak hanya bersifat operasional tetapi juga melalui pendokumentasian dan evaluasi. Ia menyatakan, *“Kami mendokumentasikan semua kegiatan dan laporkan pemerintah desa. Setiap kegiatan disertai pendampingan dan evaluasi supaya hasilnya maksimal.”* Setiap kegiatan PKK selalu didampingi, baik dari aspek administrasi maupun pelaksanaan, dengan pengawasan langsung, arahan, dan pendampingan untuk memastikan kegiatan sesuai dengan standar PKK. Laporan kegiatan kemudian disusun dalam bentuk laporan tahunan yang diserahkan ke pemerintah desa sebagai bentuk akuntabilitas.

Pemerintah desa pun memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program PKK. Kepala Desa Lempe, Bapak Zainal Ishak, menjelaskan, *“PKK itu ujung tombak pelaksanaan program desa yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Pemerintah desa dukung lewat dana, fasilitas dan pembinaan.”* Wawancara ini dapat disimpulkan bahwa PKK merupakan pelaksana utama program pemerintah desa, turun langsung ke masyarakat, dan mendapatkan dukungan berupa dana, fasilitas, serta pembinaan agar program dapat berjalan optimal.

Kegiatan PKK dalam tahap pelaksanaan juga menekankan pemberdayaan perempuan. Ibu Mardawia Marban, tokoh perempuan Desa Lempe, menyampaikan, *“PKK melibatkan perempuan dalam berbagai kegiatan, seperti penyuluhan kesehatan dan pelatihan keterampilan, kegiatan ini membantu perempuan lebih mandiri.”* Pernyataan ini diperkuat oleh Ibu Nurhayati, kader PKK, yang menegaskan, *“Kami aktif mengadakan penyuluhan kesehatan, dan gotong royong untuk mendukung program pemerintah desa. Program kami fokus pada pemberdayaan keluarga agar mereka dapat mandiri secara ekonomi dan sosial.”* Kegiatan PKK tidak hanya bersifat administratif tetapi juga operasional, dengan fokus pada pelatihan keterampilan, penyuluhan kesehatan, dan gotong royong yang memberdayakan perempuan agar mampu mandiri secara sosial dan ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara, partisipasi PKK dalam pelaksanaan program desa mencakup keterlibatan aktif dalam menjalankan program kerja pemerintah desa, menggerakkan masyarakat, mendampingi setiap kegiatan, mendokumentasikan kegiatan, dan menjadi pelaksana terdepan program pemerintah desa. Pemberdayaan

Kesejahteraan Keluarga di Desa Lempe menunjukkan tingkat partisipasi yang aktif, di mana anggota terlibat nyata dalam mendukung keberhasilan setiap program pemerintah sekaligus meningkatkan kapasitas perempuan sebagai agen pengembangan masyarakat, bukan sekadar penerima manfaat.

### 3. Partisipasi dalam Pengambilan Manfaat

Partisipasi dalam pengambilan manfaat terjadi setelah program atau kegiatan dilaksanakan, yaitu ketika masyarakat mulai merasakan dan memanfaatkan hasil dari kegiatan tersebut. Anggota PKK mendapatkan berbagai manfaat langsung dari keterlibatan mereka dalam program-program PKK. Ibu Darmawati, Ketua PKK Desa Lempe, menjelaskan, *“Anggota PKK dapat manfaat langsung, terutama peningkatan pengetahuan tentang kesehatan dan keluarga.”* Pernyataan ini diperkuat oleh Ibu Melinda, Sekretaris PKK, yang menyampaikan, *“Lewat kegiatan PKK, anggota merasa dihargai karena bisa ikut dalam proses pengambilan keputusan. Mereka juga belajar banyak hal.”* Kegiatan PKK tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan rasa dihargai, percaya diri, dan kemampuan anggota untuk lebih mandiri dalam keluarga maupun masyarakat.

Kepala Desa Lempe, Bapak Zainal Ishak, menambahkan bahwa dampak kegiatan PKK juga terlihat pada aspek ekonomi. Ia menyatakan, *“Saya lihat anggota PKK jadi lebih percaya diri dan mandiri. Ada yang bisa kelola usaha kecil dan bantu ekonomi keluarga.”* Manfaat kegiatan PKK tidak hanya bersifat sosial dan psikologis, tetapi juga memberi dampak nyata pada kesejahteraan ekonomi keluarga. Partisipasi dalam kegiatan PKK juga berkontribusi pada peningkatan *social capital*, yakni rasa kebersamaan, gotong royong, dan saling mendukung antarwarga Desa Lempe.

Peran PKK dalam memperkuat hubungan sosial juga ditegaskan oleh tokoh perempuan Desa Lempe, Ibu Mardawia Marban, yang menjelaskan, *“Partisipasi PKK mempererat hubungan sosial antar warga dan memperkuat kebersamaan.”* Sedangkan Ibu Nurhayati, kader PKK, menambahkan, *“Melalui pelatihan, kami dapat keterampilan baru seperti menjahit dan mengelola usaha kecil.”* Kegiatan PKK tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi anggotanya, tetapi juga berimplikasi pada masyarakat luas, memperkuat solidaritas sosial, dan membangun ketahanan sosial desa.

Berdasarkan hasil wawancara, partisipasi dalam pengambilan manfaat mencakup banyak dampak positif bagi anggota PKK maupun masyarakat. Anggota PKK memperoleh peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri, sementara masyarakat mendapatkan manfaat sosial dan ekonomi, termasuk penguatan hubungan sosial dan ketahanan komunitas. Dengan demikian, PKK berperan penting dalam memastikan hasil program pemerintah desa dirasakan secara nyata dan berkelanjutan oleh seluruh lapisan masyarakat.

### 4. Partisipasi dalam evaluasi

Partisipasi dalam evaluasi merupakan bentuk keterlibatan masyarakat dalam menilai, mengawasi, dan memberikan umpan balik terhadap pelaksanaan suatu program atau kegiatan. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga tidak hanya berperan

dalam perencanaan dan pelaksanaan, tetapi juga aktif dalam menilai keberhasilan, hambatan, serta dampak dari program yang telah dijalankan. Ibu Darmawati, Ketua PKK Desa Lempe, menjelaskan, *“Kami selalu melakukan evaluasi setelah kegiatan, biasanya lewat rapat koordinasi dengan pemerintah desa.”* Pernyataan ini diperkuat oleh Ibu Melinda, Sekretaris PKK, yang menyampaikan, *“Kami ikut proses evaluasi yang dilakukan pemerintah desa dan buat laporan kegiatan rutin.”*

Kepala Desa Lempe, Bapak Zainal Ishak, menegaskan bahwa evaluasi partisipasi PKK bersifat wajib untuk memastikan program tetap efektif. Ia menyatakan, *“Evaluasi partisipasi PKK itu wajib, kami pantau lewat rapat dan laporan supaya program tetap efektif.”* Dapat disimpulkan bahwa PKK melakukan evaluasi setelah kegiatan selesai, menilai apakah kegiatan telah berjalan sesuai rencana, mencatat kendala yang muncul, serta menentukan langkah perbaikan yang diperlukan. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga mengadakan rapat dengan pemerintah desa untuk membahas hasil evaluasi dan menyusun laporan kegiatan secara rutin. Pelaksanaan evaluasi secara berkala menunjukkan bahwa PKK memiliki sistem kerja yang terbuka dan akuntabel, serta mampu melakukan perbaikan program sesuai kebutuhan masyarakat.

Kegiatan evaluasi juga menjadi wadah komunikasi dan refleksi bagi PKK. Ibu Mardawia Marban, tokoh perempuan Desa Lempe, menyampaikan, *“Kami diundang untuk sampaikan hasil kegiatan dan kendala yang dihadapi, pemerintah bantu cari solusinya.”* Begitu pula Ibu Nurhayati, kader PKK, yang menegaskan, *“Kami ikut evaluasi rutin, biasanya untuk 10 program PKK. Dari situ kita tahu apa yang perlu diperbaiki.”* Evaluasi memberikan kesempatan bagi PKK untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa, menilai kinerja sendiri, dan merumuskan perbaikan program ke depan.

Berdasarkan hasil wawancara, partisipasi dalam evaluasi oleh PKK mencakup kegiatan menilai hasil program, mengikuti rapat evaluasi bersama pemerintah desa, menyusun laporan kegiatan, serta merumuskan langkah perbaikan program. Bentuk evaluasi ini memperlihatkan adanya partisipasi reflektif dan akuntabel, di mana PKK mampu menilai kinerjanya sendiri dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program di masa yang akan datang.

## **Pembahasan**

### **1. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan**

Partisipasi dalam pengambilan keputusan merupakan salah satu dimensi penting dalam konsep partisipasi masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh (Cohen and Uphoff, 1977). yaitu keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penentuan kebijakan sebelum suatu program dilaksanakan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa PKK telah menjalankan partisipasi secara aktif dan terstruktur. Mekanisme partisipasi dimulai dari pengumpulan aspirasi melalui dasawisma, pengelolaan data oleh Pokja PKK, pelaksanaan rapat koordinasi internal, hingga pengajuan usulan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang) dan keterlibatan dalam pembahasan RKP Desa.

Pola tersebut menunjukkan bahwa partisipasi yang terjadi bukan sekadar

kehadiran formal dalam forum musyawarah, tetapi telah berlangsung sejak tahap awal perencanaan. Hal ini sejalan dengan penelitian (Nadhiro and Choiriyah, 2024) yang menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa dapat berlangsung secara sistematis sejak pembentukan tim, rapat tingkat dusun, hingga penyusunan rencana yang kemudian diakomodasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Temuan tersebut memperkuat bahwa partisipasi yang efektif adalah partisipasi yang berjenjang dan terintegrasi dalam sistem kelembagaan desa.

Selain itu, hasil penelitian ini juga konsisten dengan temuan (Geovany, Rachmawati and Sampurna, 2025) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam Musrenbang desa merupakan dimensi penting dalam perencanaan pembangunan, terutama dalam memberikan masukan yang menjadi dasar pengambilan keputusan. Penelitian tersebut juga mengidentifikasi adanya tantangan berupa rendahnya kehadiran dan kontribusi aktif warga dalam forum musyawarah. Dibandingkan dengan kondisi Desa Lempe, keberadaan PKK sebagai wadah organisasi perempuan berperan dalam meminimalisasi hambatan tersebut melalui mekanisme pengumpulan aspirasi yang dilakukan sebelum forum Musrenbang berlangsung, sehingga partisipasi menjadi lebih terarah dan substantif.

Ditinjau dari perspektif partisipasi politik sebagaimana dikaji oleh (Lahtifah, Alamsyah and Rusdin, 2025) ditemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam konteks Pilkada cenderung didominasi kategori pengamat dan apolitis, yang dipengaruhi oleh rendahnya literasi politik, kendala administratif, faktor pekerjaan, serta mobilitas penduduk. Perbandingan ini menunjukkan bahwa bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh konteksnya. Partisipasi bisa bersifat pasif dan individual, sedangkan dalam konteks pembangunan desa yang difasilitasi oleh organisasi kemasyarakatan seperti PKK, partisipasi dapat lebih aktif, kolektif, dan terorganisir.

Partisipasi dalam pengambilan keputusan di Desa Lempe melalui PKK tidak hanya memenuhi indikator partisipatif secara prosedural, tetapi juga menunjukkan adanya dimensi pemberdayaan. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa, khususnya dalam mengartikulasikan aspirasi perempuan agar terakomodasi dalam kebijakan desa. Integrasi antara mekanisme internal organisasi, forum musyawarah desa, dan dukungan kelembagaan pemerintah desa memperlihatkan bahwa partisipasi yang terstruktur dan berkelanjutan cenderung menghasilkan keterlibatan yang lebih efektif dalam proses pengambilan keputusan pembangunan desa.

## **2. Partisipasi dalam Pelaksanaan**

Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan bentuk keterlibatan masyarakat yang terjadi setelah tahapan pengambilan keputusan, yakni ketika masyarakat ikut serta langsung dalam menjalankan program atau kegiatan yang telah disepakati bersama. Menurut (Cohen and Uphoff, 1977), partisipasi pada tahap pelaksanaan mencakup

keterlibatan dalam memberikan kontribusi nyata berupa tenaga, waktu, pikiran, keterampilan, maupun sumber daya lainnya untuk mendukung keberhasilan suatu program.

Berdasarkan hasil wawancara di Desa Lempe, partisipasi pelaksanaan PKK tampak jelas melalui kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan *rencana kerja* yang disusun mengacu pada 10 program pokok PKK, meskipun dalam praktiknya terdapat sembilan program yang terealisasi (Cohen and Uphoff, 1977). Ketua PKK menyatakan bahwa PKK menjadi mitra kerja yang menggerakkan masyarakat, khususnya perempuan, dalam berbagai kegiatan pembangunan desa (Purnamasari *et al.*, 2025). Sekretaris PKK menambahkan bahwa setiap kegiatan didokumentasikan, dilaporkan kepada pemerintahan desa, kemudian didampingi dan dievaluasi untuk memastikan ketercapaian tujuan program, menunjukkan bahwa pelaksanaan tidak sekadar administratif tetapi juga operasional dan terarah (*implementation*), karena dalam praktik pelaksanaan pembangunan desa masyarakat tidak hanya hadir secara fisik tetapi juga terlibat dalam pelaporan, dokumentasi, dan evaluasi kegiatan guna mendukung keberhasilan program (partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan mencakup kontribusi fisik, nonfisik, serta sumber daya lokal) sebagaimana ditemukan dalam penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Benuang yang menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan mencakup pemberian bantuan berupa tenaga dan pikiran yang memperlancar realisasi kegiatan (Saputra, Amaliatulwalidain and Febriyanti, 2022). Kepala Desa juga menegaskan bahwa PKK merupakan *ujung tombak* pelaksanaan program desa yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan didukung oleh pemerintah desa melalui dana, fasilitas, dan pembinaan, karena peran PKK dalam pemberdayaan masyarakat desa sering kali menjadi mitra strategis dalam kegiatan pembangunan lokal dan mendapat dukungan dari pemerintah desa lewat kolaborasi program serta fasilitasi sumber daya untuk menunjang keberhasilan kegiatan (Atid, Gobel and Thalib, 2025).

Peran PKK dalam menyelenggarakan penyuluhan kesehatan, pelatihan keterampilan, dan *gotong royong* mengindikasikan bahwa partisipasi tersebut bersifat aktif, di mana kader dan tokoh perempuan ikut serta dalam kegiatan yang meningkatkan kapasitas perempuan serta mendukung ketahanan ekonomi dan sosial keluarga, karena dalam banyak program pemberdayaan masyarakat partisipasi warga pada pelaksanaan kegiatan seperti penyuluhan, pelatihan, dan kerja bakti merupakan bentuk kontribusi nyata yang memperkuat efektivitas pelaksanaan program pembangunan di tingkat desa (Rizki and Sumarto, 2024).

Temuan ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa sangat diperlukan karena peran serta mereka, baik dalam tenaga, gagasan, maupun sumber daya lokal, memperlancar dan menentukan keberhasilan implementasi kegiatan pembangunan (Harefa, 2024). Penelitian menunjukkan bahwa dalam tahap pelaksanaan masyarakat sering memberikan kontribusi fisik, nonfisik, serta sumber daya lokal guna memperlancar realisasi kegiatan yang telah direncanakan (*implementation stage*), dan

keterlibatan tersebut berkorelasi dengan keberhasilan program secara keseluruhan (Purnamasari *et al.*, 2025).

*Participation* pada tahap ini tidak hanya berkaitan dengan kehadiran masyarakat tetapi juga kontribusi nyata seperti tenaga, ide, dan koordinasi kegiatan (Geovany, Rachmawati and Sampurna, 2025). Studi lain menyatakan bahwa keberhasilan implementasi program pembangunan desa sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat terlibat dan memahami proses pelaksanaan, karena semakin tinggi keterlibatan akan berdampak pada kualitas hasil program yang diperoleh (Nadhiro and Choiriyah, 2024). Literatur juga menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa perlu didukung melalui kapasitas pengetahuan masyarakat dan fasilitasi oleh pemerintah atau lembaga terkait agar partisipasi menjadi lebih efektif dan berkelanjutan (Purnamasari *et al.*, 2025).

Temuan tersebut juga diperkuat oleh penelitian (Fajri, Arief and Husain, 2025), yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan pembangunan tidak hanya bergantung pada kesediaan masyarakat untuk terlibat, tetapi juga pada adanya koordinasi, komunikasi, dan dukungan kelembagaan yang memadai dari pemerintah desa. Penelitian tersebut menegaskan bahwa keberhasilan implementasi program sangat dipengaruhi oleh sinergi antara aparat desa dan kelompok masyarakat sebagai pelaksana kegiatan. Penelitian ini relevan dengan kondisi di Desa Lempe, di mana PKK berperan sebagai mitra strategis pemerintah desa dalam menjalankan berbagai program pemberdayaan.

Partisipasi PKK dalam pelaksanaan program di Desa Lempe menunjukkan dimensi keterlibatan aktif masyarakat yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga strategis dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan desa (Geovany, Rachmawati and Sampurna, 2025).

### **3. Partisipasi dalam Pengambilan Manfaat**

Partisipasi dalam pengambilan manfaat merupakan bentuk keterlibatan masyarakat yang terjadi setelah program atau kegiatan dilaksanakan, yaitu ketika masyarakat memperoleh dan merasakan hasil dari kegiatan tersebut (Cohen and Uphoff, 1977), menjelaskan bahwa partisipasi pada tahap ini tidak hanya sebatas menerima hasil pembangunan secara pasif, tetapi mencakup keterlibatan aktif dalam memanfaatkan, memelihara, serta mengembangkan hasil kegiatan agar memberikan manfaat yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara di Desa Lempe, anggota PKK memperoleh manfaat langsung dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan, seperti peningkatan pengetahuan tentang kesehatan keluarga, keterampilan pengolahan produk rumah tangga, serta peluang pengelolaan usaha kecil yang membantu perekonomian keluarga. Selain manfaat ekonomi, anggota PKK juga merasakan dampak sosial dan psikologis berupa meningkatnya rasa percaya diri, penghargaan diri, serta kemandirian dalam kehidupan sosial. Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak hanya berdampak pada aspek material, tetapi juga pada pemberdayaan individu dan

penguatan posisi sosial perempuan di tingkat desa.

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Syamsiyah *et al.*, 2025) yang menyatakan bahwa komunitas desa yang terlibat dalam tahapan *benefit capture* cenderung mengalami peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kesejahteraan ekonomi secara berkelanjutan. Menurut penelitian oleh, (Dwijosusilo and Shafiyah, 2020) menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil pembangunan infrastruktur tercermin dari penggunaan program sesuai fungsinya, yang menunjukkan bahwa kualitas partisipasi pada tahap manfaat berkaitan erat dengan kualitas hasil pembangunan yang diterima masyarakat.

Lebih lanjut, (Laliboso, Pangkey and Londa, 2024) menegaskan bahwa partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan tidak hanya terbatas pada penggunaan fisik program, tetapi juga mencakup keterlibatan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan dan keberfungsian hasil pembangunan tersebut. Artinya, partisipasi pada tahap ini memiliki dimensi keberlanjutan (*sustainability*) yang menjadi indikator keberhasilan program pembangunan desa.

Selain itu, penelitian (Lingkua, Sasterio and Pradana, 2025) juga menekankan bahwa keberhasilan program pemberdayaan masyarakat sangat ditentukan oleh sejauh mana masyarakat mampu menginternalisasi manfaat program dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk peningkatan kapasitas individu maupun penguatan ekonomi keluarga. Partisipasi yang efektif pada tahap pengambilan manfaat akan menciptakan dampak jangka panjang karena masyarakat tidak hanya menjadi penerima program, tetapi menjadi subjek yang mengembangkan hasil kegiatan secara mandiri.

Jika dianalisis secara komparatif, temuan di Desa Lempe menunjukkan kesesuaian dengan berbagai penelitian terdahulu tersebut. Anggota PKK tidak hanya menerima manfaat kegiatan secara pasif, tetapi aktif memanfaatkan keterampilan yang diperoleh untuk menunjang ekonomi keluarga dan memperkuat peran sosial mereka. Partisipasi PKK dalam pengambilan manfaat telah mencerminkan bentuk pemberdayaan yang berkelanjutan, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun psikologis. Hal ini sekaligus memperkuat ketahanan sosial masyarakat Desa Lempe secara umum.

#### **4. Partisipasi dalam evaluasi**

Partisipasi dalam evaluasi merupakan bentuk keterlibatan masyarakat dalam menilai, mengawasi, serta memberikan umpan balik terhadap pelaksanaan suatu program atau kegiatan setelah program tersebut berjalan. Menurut (Cohen and Uphoff, 1977), partisipasi evaluasi menjadi tahap penting dalam proses partisipasi karena masyarakat tidak hanya terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan, tetapi juga berperan dalam menilai keberhasilan, hambatan, serta dampak dari program yang telah dilaksanakan. Dengan demikian, evaluasi menjadi indikator sejauh mana partisipasi masyarakat berlangsung secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil wawancara di Desa Lempe, PKK secara konsisten melakukan evaluasi setelah kegiatan selesai melalui rapat koordinasi bersama pemerintah desa, penyusunan laporan kegiatan secara rutin, serta pembahasan hasil pelaksanaan

program untuk menentukan aspek yang perlu diperbaiki. Kepala Desa menegaskan bahwa evaluasi partisipasi PKK merupakan kegiatan wajib agar program desa tetap berjalan efektif. Sementara itu, tokoh perempuan dan kader PKK menyampaikan bahwa evaluasi rutin membantu mengidentifikasi kekurangan dalam pelaksanaan rencana kerja, sehingga program berikutnya dapat disusun lebih baik dan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Temuan ini menunjukkan bahwa evaluasi bukan sekadar formalitas administratif, tetapi menjadi ruang refleksi dan komunikasi antara PKK dan pemerintah desa. Partisipasi dalam evaluasi memperlihatkan adanya transparansi, akuntabilitas, serta kemampuan organisasi dalam melakukan perbaikan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan (Ray, 2020) yang menegaskan bahwa partisipasi masyarakat pada tahap evaluasi pembangunan desa merupakan indikator penting keberhasilan keterlibatan warga, karena masukan dari masyarakat dapat digunakan sebagai dasar perbaikan dan penyesuaian program selanjutnya. Evaluasi dalam konteks partisipatif menjadi bagian dari proses pembelajaran kolektif untuk meningkatkan kualitas pembangunan desa.

Selain itu, (Irfat, Lampe and Mahfuzat, 2025) juga menekankan bahwa partisipasi masyarakat dalam evaluasi program pembangunan memiliki peran strategis dalam memastikan keberlanjutan program dan mencegah terjadinya penyimpangan pelaksanaan kegiatan. Evaluasi partisipatif memungkinkan masyarakat menyampaikan kritik dan saran secara langsung, sehingga tercipta mekanisme kontrol sosial yang memperkuat tata kelola yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dibandingkan dengan penelitian (Samad, Nawawi and Bahri, 2025) mengenai implementasi kebijakan pengendalian minuman beralkohol di Desa Karya Mukti, ditemukan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh aspek komunikasi, disposisi pelaksana, struktur birokrasi, serta ketersediaan sumber daya. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun komunikasi dan struktur birokrasi berjalan baik, keterbatasan sumber daya dan rendahnya keterlibatan Masyarakat khususnya pemuda menjadi hambatan dalam efektivitas kebijakan. Temuan ini memperkuat pentingnya partisipasi dalam tahap evaluasi, karena melalui evaluasi yang partisipatif, kendala sumber daya maupun rendahnya keterlibatan masyarakat dapat diidentifikasi dan diperbaiki secara bersama.

Evaluasi yang dilakukan PKK secara rutin bersama pemerintah desa menunjukkan adanya komunikasi yang terbuka dan struktur koordinasi yang berjalan baik. Berbeda dengan temuan Samad yang masih menghadapi kendala keterlibatan masyarakat, evaluasi partisipatif PKK di Desa Lempe justru menjadi sarana untuk menjaga keberlanjutan partisipasi dan meningkatkan efektivitas program secara kolektif.

Partisipasi dalam evaluasi di Desa Lempe telah mencerminkan prinsip partisipatif yang komprehensif, yaitu keterlibatan masyarakat dalam seluruh tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengambilan manfaat, hingga

evaluasi. Integrasi antara evaluasi partisipatif, komunikasi yang terbuka, serta koordinasi kelembagaan yang baik memperkuat efektivitas dan keberlanjutan pembangunan desa secara menyeluruh.

### **Kesimpulan**

Partisipasi anggota PKK dalam mendukung program kerja Pemerintah Desa Lempe, Kecamatan Dampal Selatan, menunjukkan bahwa keterlibatan anggota telah berlangsung dalam berbagai kegiatan pemberdayaan keluarga. Struktur organisasi PKK yang telah terbentuk hingga tingkat dasawisma memberikan ruang bagi anggota untuk berperan dalam pelaksanaan program-program yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Keberadaan PKK juga berfungsi sebagai wadah yang mendorong keterlibatan perempuan dalam kegiatan pembangunan di tingkat desa.

Partisipasi anggota PKK masih cenderung terfokus pada pelaksanaan kegiatan rutin, sementara keterlibatan dalam tahap perencanaan dan evaluasi program belum optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran PKK sebagai mitra strategis pemerintah desa dalam pemberdayaan keluarga masih perlu diperkuat agar keterlibatan anggota dapat berlangsung secara lebih menyeluruh dalam setiap tahapan program.

Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan peran dan kapasitas anggota PKK agar partisipasi tidak hanya bersifat pelaksana kegiatan, tetapi juga mencakup kontribusi dalam proses perencanaan dan evaluasi program. Penguatan partisipasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program pemberdayaan keluarga serta memperkuat peran PKK dalam mendukung pembangunan desa yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### **Ucapan Terima Kasih**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing, Bapak Muhammad Arief dan Ibu Indah Ahdiah, atas bimbingan, arahan, dan masukan berharga selama proses penelitian. Terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Desa Lempe, termasuk Kepala Desa, BPD, serta PPS/KKPS, dan seluruh masyarakat yang telah memberikan izin serta informasi yang dibutuhkan. Ucapan terima kasih turut disampaikan kepada keluarga, sahabat, dan semua pihak yang telah memberikan dukungan sehingga penelitian

### **Referensi**

- Atid, W., Gobel, L.V. and Thalib, T. (2025) "Challenges in Implementing the Family Welfare Empowerment Program in Dambalo, North Gorontalo," *Solo International Collaboration and Publication of Social Sciences and Humanities*, 4(01), pp. 75–90. Available at: <https://doi.org/10.61455/sicopus.v4i01.370>.
- Cahya, M.N. (2024) "Analysis of the PemberdayaanKesejahteraanKeluarga(PKK)Program as an Effort to Improve

- Family Well-Being in Rural Areas," *Asesment: Journal of Counseling Guidance*, 2(2), pp. 142–163. Available at: <https://doi.org/https://10.59784/asesment.v2i2.128>.
- Cohen, J.M. and Uphoff, N.T. (1977) *Rural Development Participation: Concepts and Measures for Project Design, Implementation, and Evaluation*. Rural Development Committee.
- Dwijosusilo, K. and Shafiyah, S. (2020) "Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur di Desa Klobur Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang," *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, 4(2), p. 143. Available at: <https://doi.org/10.25139/jmnegara.v4i2.3068>.
- Fajri, M., Arief, M. and Husain, S. (2025) "Pengaruh Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) PT Esaputli Prakarsa Utama Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Bambapula," *JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan*, 1(5), pp. 258–272.
- Geovany, D.H., Rachmawati, I. and Sampurna, R.H. (2025) "Community Participation in the Development Plan of Mande Village, Mande District, Cianjur Regency," *International Journal of Law, Public Administration and Social Studies*, 2(4), pp. 229–237. Available at: <https://doi.org/10.47353/lawpass.v2i4.52>.
- Hakim, L. and Mone, A. (2021) "PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM POKOK PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI DESA BONERATE KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR," 2.
- Harefa, E.W. (2024) "The Level of Community Participation in Village Fund Management," *Jurnal Pendidikan Kesehatan*, 13(1), p. 99. Available at: <https://doi.org/10.31290/jpk.v13i1.4497>.
- Irfat, Lampe, I. and Mahfuzat (2025) "(CSR) PT Vale di Desa Ululere, Morowali," *JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan*, 1(5), pp. 359–382.
- Irwan and Rusdi, M. (2019) "MODEL MANAJEMEN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG," *Jurnal MODERAT*, 5(3), pp. 396–410.
- Khadikah, N.N. and Muljanto, M.A. (2025) "Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Sebagai Pendorong Dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Gemekan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto," *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 3(2), pp. 565–573. Available at: <https://doi.org/10.61579/future.v3i2.406>.
- Lahtifah, S., Alamsyah, M.N. and Rusdin, R.B. (2025) "PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 DI DESA KALUKUBULA," *JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan*, 1(5), pp. 335–347.
- Laliboso, S.Y., Pangkey, M. and Londa, V. (2024) "PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA AMBIA UTARA KECAMATAN ESSANG SELATAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD," *JURNAL Administrasi Publik*, 10(2), pp. 61–70.
- Limpele, O.J., Setiabudhi, D.O. and Sendow, A.V. (2025) "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP FUNGSI DAN KEWENANGAN LEMBAGA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA," *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, 14(2). Available at:

- <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/65049>.
- Lingkua, C.L., Sasterio and Pradana, A. (2025) "Dynamic Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Mandula, Kecamatan Lembo Raya, Kabupaten Morowali Utara," *JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan*, 1(5), pp. 398–411.
- Malthuf, M. and Hapiatun, M. (2024) "PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEREKONOMIAN PEREMPUAN RAWAN SOSIAL EKONOMI MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)," *SOCIETY*, 15(1), pp. 16–27. Available at: <https://doi.org/10.20414/society.v15i1.11341>.
- Mendagri (2020) *PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA: NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PERATURAN P=LAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 2017 TENTANG GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA*. Available at: [https://peraturan.bpk.go.id/Download/236157/PERMENDAGRI\\_36\\_TAHUN\\_2020%20\(1\).pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/236157/PERMENDAGRI_36_TAHUN_2020%20(1).pdf).
- Mita, Selfiana and Arsalim (2025) "Implementasi Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Di Desa Watudemba Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan," *Journal Of Government Science*, 1(2), pp. 114–123. Available at: <https://doi.org/10.54297/jogs.v1i2.1226>.
- Munawaroh, M. and Khotimah, K. (2025) "Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Keberhasilan Pembangunan Desa Di Desa Sumber Ketempa Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember," *Furmula Jurnal Administrasi Publik*, 2(2), pp. 112–120.
- Nadhiro, R.A. and Choiriyah, I.U. (2024) "Community Participation in Village Development Planning," *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 25(1). Available at: <https://doi.org/10.21070/ijppr.v25i1.1366>.
- Nurkhalisa, N. (2024) "PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA TELUKJAMBE KECAMATAN TELUKJAMBE TIMUR KABUPATEN KARAWANG," *Communnity Development Journal*, 5(1), pp. 1914–1922.
- Purnamasari, I. *et al.* (2025) "Partisipasi Masyarakat dalam Penerapan Smart Village," *Jurnal Governansi*, 11(1), pp. 83–90. Available at: <https://doi.org/10.30997/jgs.v11i1.18499>.
- Rahmah, L.A. *et al.* (2024) "COMMUNITY PARTICIPATION IN PREPARING THE VILLAGE GOVERNMENT WORKING PLAN," *Journal of Social Dynamics and Governance*, 1(1), pp. 37–50. Available at: <https://doi.org/10.26740/jsdg.v1i1.35640>.
- Rahmawan, T.I. (2023) "Mewujudkan Partisipasi yang Bermakna dalam Pembentukan Peraturan Desa," *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(3), pp. 65–80. Available at: <https://doi.org/10.54629/jli.v20i3.1177>.
- Ray, F. (2020) "PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA HOKU-HOKU GAM KABUPATEN HALMAHERA BARAT," 6(94). Available at: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/29701>.
- Rizki, H.A. and Sumarto, S. (2024) "Partisipasi Masyarakat dalam Penguatan Kampung Pancasila di Desa Rejosari Kecamatan Grobogan Kabupaten

- Grobogan," *Unnes Civic Education Journal*, 9(2). Available at: <https://doi.org/10.15294/ucej.v9i2.9989>.
- Samad, A., Nawawi, M. and Bahri, S. (2025) "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN MINUMAN BER-ALKOHOL DI DESA KARYA MUKTI KECAMATAN DAMPELAS KABUPATEN DONGGALA," *JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan*, 1(4), pp. 217–230.
- Santia, S., Herlina, H. and Sa'di, K. (2025) "Pengaruh Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Desa Kotaraja Kecamatan Sikur," *Transformasi: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Non Formal Informal*, 11(1), p. 68. Available at: <https://doi.org/10.33394/jtni.v11i1.15105>.
- Saputra, W.A., Amaliatulwalidain and Febriyanti, D. (2022) "PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA BENUANG KECAMATAN TALANG UBI KABUPATEN PALI," *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara (JMAN)*, 6(2). Available at: <https://jom.untidar.ac.id/index.php/jman/article/view/2783/pdf>.
- Sutiyo and Maharjan, K.L. (2017) *Decentralization and Rural Development in Indonesia*. Singapore: Springer Singapore. Available at: <https://doi.org/10.1007/978-981-10-3208-0>.
- Syamsiyah, N. *et al.* (2025) "Community Participation in the Development of Sustainable, Environmentally Conscious Villages in the Cirasea Sub-Watershed, Indonesia," *Sustainability*, 17(11), p. 4871. Available at: <https://doi.org/10.3390/su17114871>.